Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS]
Vol. 6, No.3, Mei 2024, Hal. 385-391
ISSN: 2808-6686

# ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN

**[1]Mutia Pramita**

[1]Program Studi Akuntansi, [1]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

*[1]Email: mutiapramitaa@gmail.com*

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dengan menggunakan metode Value for Money. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018 sampai 2022. Teknik analisis menggunakan rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi defisit pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun 2019 sampai 2022. Rasio ekonomis berada pada kategori ekonomis dengan nilai antara 92,77 persen hingga 99,86 persen. Rasio efisiensi berada pada kategori kurang efisien dan tidak efisien dengan nilai antara 93,98 persen hingga 103 persen. Rasio efektivitas berada pada kategori efektif dan stabil dengan nilai 100 persen setiap tahun. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Kantor Desa Sekoci dinilai cukup baik dari sisi ekonomis dan efektivitas, tetapi perlu perbaikan pada sisi efisiensi.*

***Kata Kunci:*** *Kinerja Keuangan, Value for Money, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas*

## I. PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik merupakan instansi pemerintah yang bertugas membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, jasa pelayanan publik, keamanan, dan kepastian hukum. Organisasi sektor publik dapat dikatakan baik apabila mampu menjalankan tugasnya mencapai tujuan sesuai standar yang ditetapkan dan dilaksanakan pada tingkat ekonomis, efisien, dan efektif (Khalikussabir, 2017). Namun, organisasi sektor publik sering dinilai publik sebagai institusi yang kurang maksimal, kurang produktif, dan sumber pemborosan dana. Oleh sebab itu, dibutuhkan alat atau prosedur untuk mengukur kinerja institusi pemerintah sehingga dapat diketahui sejauh mana peningkatan mutu kinerja telah dilaksanakan.

Kinerja keuangan merupakan isu penting dalam organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja. Semua pemerintah dituntut mampu menghasilkan kinerja keuangan secara baik (Ardila, 2015). Meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit kerja pemerintah, departemen, dan lembaga negara diharapkan dapat mengurangi pemborosan, kebocoran dana, dan mendeteksi program yang tidak layak secara ekonomi. Salah satu alat untuk menilai pertanggungjawaban instansi pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangannya melalui perhitungan dan analisis pencapaian target dan realisasi penerimaan dan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pengukuran kinerja adalah proses memperkirakan aktivitas apakah sudah dilaksanakan sesuai rencana dan berhasil meraih sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja biasanya diawali dengan penetapan indikator untuk memberikan informasi yang memungkinkan organisasi sektor publik memonitor kinerjanya dalam menciptakan output dan outcome untuk publik (Sinambela & Pohan, 2016). Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2014).

Salah satu cara penilaian kinerja adalah dengan konsep Value for Money, yaitu pengukuran kinerja menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Ritonga, 2021). Ekonomi adalah perbandingan input dengan input value dalam satuan nilai rupiah. Efisiensi adalah perbandingan output dengan input berdasarkan standar kinerja atau target yang ditetapkan. Efektivitas adalah perbandingan antara outcome dengan output. Value for Money diharapkan mampu melakukan evaluasi kinerja yang baik dengan melihat pelaporan APBDes setiap tahunnya.

Laporan keuangan tidak terlepas dari bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisien sehingga memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja

(Puspitaningtyas, 2017). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran pemerintahan adalah tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran mempunyai peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi, serta penilaian kinerja (Sinambela et al., 2018). Kegunaan analisis kinerja keuangan dalam Laporan APBDes adalah untuk membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui perkembangan kinerja keuangan yang terjadi.

Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat menghadapi permasalahan dalam laporan keuangannya. Terjadi defisit pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun 2019 sampai 2022. Selain itu, terdapat peningkatan dan penurunan dalam rasio ekonomis, serta penurunan efisiensi pemerintah desa dalam melakukan pembiayaan pemerintahannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya defisit, penyebab peningkatan dan penurunan rasio ekonomis, penyebab menurunnya efisiensi, serta kinerja keuangan Kantor Desa Sekoci jika diukur menggunakan metode Value for Money. Temuan Januri (2021) menegaskan bahwa pengendalian intern dan pengelolaan keuangan yang baik sangat menentukan efektivitas dan efisiensi organisasi, sehingga analisis ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kinerja keuangan desa.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Hanum (2011), penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menuturkan masalah yang ada sekarang dengan cara menyusun data, mengelompokkan, kemudian menginterpretasikan sehingga diperoleh gambaran sebenarnya tentang kondisi objek penelitian. Tempat penelitian adalah Kantor Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018 sampai 2022. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mencari, melihat, dan mempelajari catatan serta dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik analisis data menggunakan metode Value for Money yang terdiri dari rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Rasio ekonomis dihitung dengan membandingkan realisasi biaya dengan anggaran biaya. Rasio efisiensi dihitung dengan membandingkan realisasi biaya dengan realisasi pendapatan. Rasio efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan target pendapatan. Kriteria penilaian mengacu pada Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996.

## III. HASIL PENELITIAN

Laporan Realisasi Anggaran Kantor Desa Sekoci tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan pendapatan dan belanja desa yang berfluktuasi. Pada tahun 2018, anggaran pendapatan sebesar Rp1.371.750.028 dan realisasi Rp1.372.133.058. Anggaran belanja sebesar Rp1.351.750.028 dan realisasi Rp1.330.747.921,50. Terjadi surplus sebesar Rp21.385.136,50. Pada tahun 2019, anggaran pendapatan Rp1.476.065.648 dan realisasi

Rp1.478.780.011. Anggaran belanja Rp1.498.073.164,50 dan realisasi Rp1.389.876.656. Terjadi defisit karena belanja lebih besar dari pendapatan, namun realisasi pendapatan melebihi anggaran. Pada tahun 2020, anggaran pendapatan Rp1.439.934.543 dan realisasi Rp1.444.488.133. Anggaran belanja Rp1.549.518.459,50 dan realisasi Rp1.490.191.344. Defisit kembali terjadi. Tahun 2021, anggaran pendapatan Rp1.438.727.000 dan realisasi Rp1.442.307.037. Anggaran belanja Rp1.507.862.592 dan realisasi Rp1.447.330.174. Defisit berlanjut. Tahun 2022, anggaran pendapatan Rp1.507.866.864 dan realisasi Rp1.510.179.620. Anggaran belanja Rp1.571.979.319 dan realisasi Rp1.569.816.376. Defisit masih terjadi. Dengan demikian, defisit terjadi pada tahun 2019 sampai 2022 karena jumlah belanja melebihi pendapatan.

Rasio ekonomis dihitung dengan rumus realisasi biaya dibagi anggaran biaya dikali 100 persen. Hasil perhitungan menunjukkan tahun 2018 sebesar 98,44 persen, tahun 2019 sebesar 92,77 persen, tahun 2020 sebesar 96,17 persen, tahun 2021 sebesar 95,98 persen, dan tahun 2022 sebesar 99,86 persen. Seluruh nilai berada pada rentang 90 persen sampai 100 persen, sehingga termasuk kategori ekonomis. Hal ini berarti Kantor Desa Sekoci mampu melakukan penghematan belanja setiap tahunnya karena anggaran belanja yang ditetapkan tidak habis terpakai saat realisasi. Meskipun demikian, terjadi fluktuasi yang disebabkan oleh perubahan jumlah belanja desa setiap tahunnya. Semakin besar persentase ekonomis, semakin baik kinerja keuangan (Mahsun, 2016). Dengan demikian, dari sisi ekonomis, kinerja keuangan Kantor Desa Sekoci tergolong baik.

Rasio efisiensi dihitung dengan rumus realisasi biaya dibagi realisasi pendapatan dikali 100 persen. Hasil perhitungan menunjukkan tahun 2018 sebesar 96,98 persen, tahun 2019 sebesar 93,98 persen, tahun 2020 sebesar 103 persen, tahun 2021 sebesar 100 persen, dan tahun 2022 sebesar 103 persen. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996, nilai 90 persen sampai 100 persen termasuk kurang efisien, sedangkan di atas 100 persen termasuk tidak efisien. Pada tahun 2018 dan 2019, rasio berada pada kategori kurang efisien. Pada tahun 2020 dan 2022, rasio berada pada kategori tidak efisien. Pada tahun 2021, rasio tepat 100 persen sehingga berada pada batas kurang efisien. Peningkatan persentase rasio efisiensi menunjukkan penurunan efisiensi karena belanja daerah yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan pendapatan desa. Semakin kecil rasio efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah daerah (Mardiasmo, 2014). Dengan demikian, dari sisi efisiensi, kinerja keuangan Kantor Desa Sekoci belum optimal.

Rasio efektivitas dihitung dengan rumus realisasi pendapatan dibagi target pendapatan dikali 100 persen. Hasil perhitungan menunjukkan tahun 2018 sampai 2022 masing-masing sebesar 100 persen. Nilai tersebut berada pada rentang 90 persen sampai 100 persen sehingga termasuk kategori efektif. Hal ini berarti Kantor Desa Sekoci mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas yang stabil menunjukkan bahwa perencanaan pendapatan desa berjalan dengan baik. Semakin sedikit sisa anggaran, semakin baik kinerja instansi. Sebaliknya, jika sisa anggaran banyak, kinerja instansi kurang baik karena rencana kerja kurang maksimal. Dengan demikian, dari sisi efektivitas, kinerja keuangan Kantor Desa Sekoci tergolong baik dan stabil.

## IV. PEMBAHASAN

Defisit adalah keadaan keuangan organisasi di mana pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan. Hyman (2005) mendefinisikan defisit anggaran pemerintah sebagai kelebihan pengeluaran pemerintah dari penerimaan pemerintah yang berupa pajak, fee, dan pungutan retribusi. Pada tahun 2019 sampai 2022, Kantor Desa Sekoci mengalami defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Defisit dapat mengganggu kinerja keuangan desa karena desa akan mengalami masalah keuangan. Penyebab defisit adalah adanya kebijakan pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan yang memerlukan investasi besar dan dana besar pula. Menurut Mardiasmo (2014), jumlah pendapatan daerah yang melebihi belanja menunjukkan kinerja pemerintah daerah baik, sebaliknya belanja yang melebihi pendapatan menunjukkan kinerja tidak baik. Ketidaksesuaian antara anggaran pendapatan dan belanja membuat pengelolaan dana desa tidak efisien. Untuk mengatasi defisit, Desa Sekoci dapat mengelola dana desa dengan baik, mengurangi pengeluaran, dan menambah pemasukan. Cara menutupi defisit antara lain menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Temuan ini sejalan dengan pandangan Hanum & Ritonga (2021) yang menegaskan bahwa pengendalian internal yang lemah dapat menyebabkan pengelolaan keuangan tidak efektif, sehingga defisit perlu diantisipasi melalui perencanaan yang lebih baik.

Persentase rasio ekonomis Kantor Desa Sekoci pada tahun 2018 sampai 2022 mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena perubahan jumlah belanja desa setiap tahunnya. Melalui analisis rasio ekonomis dapat diketahui seberapa besar realisasi belanja dana desa terhadap target yang ditentukan pemerintah desa. Rasio ekonomis sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat, tidak ada pemborosan, dan tepat penggunaannya. Semakin besar persentase ekonomis, semakin baik kinerja keuangan (Mahsun, 2016). Fluktuasi rasio ekonomis menunjukkan bahwa perencanaan belanja desa belum sepenuhnya stabil. Meskipun demikian, nilai rasio yang selalu berada di bawah 100 persen menandakan bahwa realisasi belanja tidak pernah melebihi anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya upaya penghematan, namun konsistensi perencanaan masih perlu ditingkatkan. Menurut Dahrani & Basri (2017), pengelolaan keuangan yang cermat akan berdampak pada kinerja keuangan yang lebih baik, sehingga Desa Sekoci perlu memperbaiki perencanaan belanjanya agar rasio ekonomis lebih stabil.

Tingkat efisiensi Kantor Desa Sekoci pada tahun 2018 dan 2019 berada di bawah 100 persen sehingga termasuk kurang efisien. Pada tahun 2020 sampai 2022, persentase rasio efisiensi meningkat, terutama tahun 2020 dan 2022 yang mencapai 103 persen. Peningkatan persentase rasio efisiensi menunjukkan penurunan efisiensi karena jumlah belanja daerah yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan pendapatan desa. Hal ini tidak baik bagi pemerintah. Semakin kecil rasio efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah daerah (Mardiasmo, 2014). Penyebab menurunnya efisiensi adalah besarnya belanja daerah yang dikeluarkan Kantor Desa Sekoci dibandingkan pendapatan desa. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa Desa Sekoci belum mampu meminimalkan belanja atau meningkatkan pendapatan secara proporsional. Padahal, efisiensi merupakan perbandingan output dengan input berdasarkan standar kinerja atau target yang ditetapkan (Ritonga, 2021). Oleh

karena itu, Desa Sekoci perlu melakukan evaluasi terhadap pos-pos belanja yang besar dan mencari alternatif pembiayaan yang lebih efisien. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sinambela et al. (2018) yang menekankan pentingnya struktur APBD yang seimbang untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil analisis, kinerja keuangan Kantor Desa Sekoci diukur dengan metode Value for Money dapat dijelaskan sebagai berikut. Rasio ekonomis tahun 2018 sebesar 98,44 persen, tahun 2019 sebesar 92,77 persen, tahun 2020 sebesar 96,17 persen, tahun 2021 sebesar 95,98 persen, dan tahun 2022 sebesar 99,86 persen. Seluruh nilai berada pada kategori ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Desa Sekoci telah mampu melakukan penghematan belanja setiap tahunnya karena anggaran belanja yang ditetapkan tidak habis terpakai saat realisasi. Rasio efisiensi tahun 2018 sebesar 96,98 persen, tahun 2019 sebesar 93,98 persen, tahun 2020 sebesar 103 persen, tahun 2021 sebesar 100 persen, dan tahun 2022 sebesar 103 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 termasuk kurang efisien, sedangkan pada tahun 2020 dan 2022 termasuk tidak efisien. Peningkatan persentase rasio efisiensi menunjukkan penurunan efisiensi karena belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan desa. Rasio efektivitas tahun 2018 sampai 2022 masing-masing sebesar 100 persen sehingga termasuk kategori efektif dan stabil. Hal ini berarti Kantor Desa Sekoci mampu melebihi dan mendekati target pendapatan yang ditetapkan. Semakin sedikit sisa anggaran, semakin baik kinerja instansi. Sebaliknya, jika sisa anggaran banyak, kinerja instansi kurang baik karena rencana kerja kurang maksimal.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Kantor Desa Sekoci berdasarkan metode Value for Money menunjukkan bahwa dari sisi ekonomis dan efektivitas sudah baik, tetapi dari sisi efisiensi masih perlu perbaikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Enre (2020) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan belum ekonomis dan kurang efisien, meskipun dari sisi efektivitas cukup efektif. Penelitian Hutagalung (2021) juga menunjukkan bahwa rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan belum tepat guna. Dengan demikian, Desa Sekoci perlu meningkatkan efisiensi dengan mengurangi belanja yang tidak perlu dan meningkatkan pendapatan desa, serta mempertahankan kinerja ekonomis dan efektivitas yang sudah baik. Menurut Ardila (2015), Value for Money adalah konsep untuk menilai kinerja organisasi sektor publik yang tidak hanya ditinjau dari aspek keuangan saja, tetapi juga aspek non keuangan untuk menilai keberhasilan program kerja. Oleh karena itu, perbaikan efisiensi harus menjadi prioritas agar kinerja keuangan Desa Sekoci semakin optimal.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Kantor Desa Sekoci mengalami defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun 2019 sampai 2022. Defisit terjadi karena jumlah belanja lebih besar daripada pendapatan. Kinerja keuangan yang diukur dengan rasio ekonomis pada tahun 2018 sampai 2022 mengalami penurunan dan peningkatan, tetapi menunjukkan kondisi yang cukup baik dan termasuk kategori ekonomis. Hal ini terlihat dari anggaran belanja yang ditetapkan tidak habis terpakai saat realisasi. Rasio efisiensi mengalami penurunan dan menunjukkan kondisi kurang efisien karena besarnya jumlah belanja daerah yang

dikeluarkan dibandingkan pendapatan desa. Rasio efektivitas berada pada kategori efektif dan stabil karena mampu mencapai target pendapatan yang ditetapkan. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Kantor Desa Sekoci dinilai cukup baik dari sisi ekonomis dan efektivitas, tetapi perlu perbaikan pada sisi efisiensi.

## VI. REFERENSI

Ardila, I. (2015). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 15(1), 28–42.

Dahrani, & Basri, M. (2017). Debt to equity ratio dan longterm debt to equity ratio terhadap return on equity di Bursa Efek. Jurnal Riset Finansial Bisnis, 1(1), 65–78. https://doi.org/10.5281/zenodo.1048970

Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model pengelolaan keuangan berbasis literasi keuangan dan inklusi keuangan: Studi pada UMKM di Kota Binjai. Owner, 6(2), 1509–1518. https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.778

Enre, D. T. (2020). Analisis Value for Money pada Anggaran Pendapatan pada Pemerintah Kota Medan (Periode 2014-2018). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Hafsah, H. (2017). Penilaian kinerja keuangan dengan menganalisis current ratio, quick ratio dan return on investment. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 17(6), 1–10.

Hanum, Z. (2011). Analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Kabupaten Serang Bedagai. Jurnal Ilmiah & Bisnis, 10(2), 1–23.

Hanum, Z., & Ritonga, P. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja kampus Islam swasta di Kota Medan. Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora, 1(1), 814–819.

Hutagalung, R. P. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode Value for Money pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Januri. (2021). Peranan sistem pengendalian intern dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi persediaan. Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora, 1, 78–84.

Mardiasmo. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Andi.

Pangkey, A. H. R., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2011-2015. Jurnal EMBA, 5(2), 2848–2858.

Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ilmiah Among Makarti, 7, 83–112.

Ritonga, P. (2021). Keuangan Negara. UMSU Press.

Sinambela, E., & Pohan, A. K. R. (2016). Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis, 16(1), 53–63.

Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis struktur APBD dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah Sumatera Utara. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 18(2), 93–101. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2527